https://e-journal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITAKARYA

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

TRANSFORMASI KEHIDUPAN SUKU SAKAI PASCA-NOMADEN: STUDI KASUS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT OLEH PT PERTAMINA HULU ROKAN WILAYAH OPERASI DURI STEAM FLOOD DI DESA TENGGANAU

Endang Reforyani[1], R. Muhammad Wildan[2], Salsya Yuniar Kurniarais[3]

[1]Lestari Foundation,

[2]PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan Wilayah Operasi Duri Steam Flood

[3]Universitas Gadjah Mada

Email : reforyani22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas transformasi kehidupan masyarakat adat suku Sakai pasca-nomaden melalui studi kasus program pemberdayaan masyarakat tempatan oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan, Wilayah Operasi Duri Steam Flood di Desa Tengganau, Riau. Perubahan pola hidup akibat deforestasi dan modernisasi menuntut masyarakat Sakai untuk beradaptasi dari pola hidup berbasis hutan menuju pemukiman menetap. Program pemberdayaan yang difokuskan pada usaha penggemukan sapi, budidaya bebek, dan pengolahan pupuk organik yang tidak hanya bertujuan meningkatkan ketahanan ekonomi, tetapi juga mendorong keberlanjutan lingkungan serta menyesuaikan dengan praktik hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengintegrasikan konsep Community Empowerment dan Sustainable Livelihood Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh PT Pertamina Hulu Rokan Zona Rokan, Wilayah Operasi Duri Steam Flood memperkuat lima aset penghidupan (human, social, natural, physical, dan financial capital) sekaligus menjadi medium rekonsiliasi sosial antara masyarakat adat dan korporasi. Dengan demikian, program pemberdayaan tidak hanya memperluas akses ekonomi masyarakat suku Sakai, tetapi juga membentuk siklus keberlanjutan hidup (life sustainability cycle) yang relevan dengan tantangan modernisasi.

Kata kunci: *Suku Sakai, masyarakat adat, community empowerment, sustainable livelihood framework, PT Pertamina Hulu Rokan Wilayah Operasi Duri Steam Flood*

LATAR BELAKANG

Sakai, salah satu dari tujuh suku asli yang mendiami wilayah Riau. Suku ini dulunya memiliki pola hidup semi-nomaden dan bergantung pada sumber daya alam (Asriwandari et al., 2024). Masyarakat suku Sakai atau orang Sakai hidup secara berkelompok dengan sebutan Batin atau Perbatinan. Adapun garis keturunan yang digunakan bersifat matrilineal serta memiliki sistem kepercayaan animisme. Secara geografis, orang Sakai terbagi dalam 13 Perbatinan yang tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Dalam sejarahnya, suku Sakai menjadi satu kelompok etnik yang digolongkan sebagai “masyarakat terasing” di Indonesia (Hijjang et al., 2023).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Beberapa dekade terakhir, predikat “masyarakat terasing” melekat di tengah perubahan besar yang dihadapi oleh suku Sakai. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan, khususnya kelapa sawit terus dilakukan hingga hari ini sehingga perlahan mengoyak hutan yang menjadi tempat tinggal sekaligus sumber kehidupan bagi suku Sakai. Pada masa Orde Baru, lahan hutan milik Suku Siak yang berada di sekitar area anak Sungai Siak dengan luas kurang lebih 1,98 juta hektare diambil alih oleh pemerintah pusat untuk perkebunan. Tak hanya itu, Perbatinan sebagai entitas sosial dari suku Sakai juga sempat dihapuskan melalui kebijakan penyeragaman desa secara administratif yang kemudian mengabaikan tata kelola adat suku Sakai. Oleh karenanya, orang Sakai menghadapi tantangan ganda, yaitu kehilangan sumber penghidupan sekaligus erosi identitas budaya.

Meski demikian, era reformasi menjadi titik balik ketika orang Sakai mulai memperoleh hak afirmatif berupa akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Akses ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong proses integrasi sosial yang lebih luas. Perubahan tersebut diiringi dengan pergeseran identitas, seperti banyak orang Sakai yang mulai memeluk agama Abrahamik seperti Kristen dan Islam sebagai bagian dari interaksi dengan komunitas lain di Riau. Transformasi ini kemudian melahirkan istilah “Sakai Maju” yang menandai berakhirnya pola hidup nomaden dan semakin kuatnya keterhubungan dengan suku-suku lain di Indonesia (Muttaqien & Bosniar, 2013; Andaya, 1997; Warren, 2003).

Pasca reformasi, masyarakat suku Sakai mulai bersatu untuk memperjuangkan ruang afirmatif yang selama ini dirasakan terbatas. Kesadaran kolektif ini melahirkan gerakan untuk menguatkan kembali jati diri dan hak-hak sosial budayanya, yang kemudian mendapat dukungan dari perusahaan setempat, PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Menurut kajian yang dilakukan oleh Hijjang et al., (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat suku Sakai dengan CPI membantu orang Sakai sendiri membangun kembali simbol-simbol penting identitasnya, seperti rumah peristirahatan Batin yang menjadi pusat kegiatan adat, serta kompleks kelompok pertanian terpadu yang merepresentasikan identitas baru Sakai Maju di Desa Pematang Pudu. Selain pembangunan fisik, berbagai program pemberdayaan juga dijalankan, mulai dari lokakarya penguatan kapasitas, pelatihan keterampilan, hingga inisiatif di bidang pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga menjadi landasan penting bagi kemandirian dan keberlanjutan suku Sakai di era modern.

Dari total 13 kelompok sosial perbatinan dalam Suku Sakai, terdapat beberapa perbatinan yang mengalami transformasi kehidupan atau perubahan sosial yang cukup signifikan. Salah satunya adalah Perbatinan Tongonong yang berada di Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Deforestasi membuat praktik nomaden tidak lagi relevan dilakukan. Ruang hidup tradisional milik orang Sakai semakin sempit. Kondisi ini mendorong masyarakat Perbatinan Tongonong untuk beradaptasi dengan mencari sumber penghidupan baru di sektor pertanian hingga industri. Namun, transisi ini tak hanya menuntut penyesuaian sosial-ekonomi, tetapi juga pergulatan dalam mempertahankan identitas budaya. Kebiasaan hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun membuat masyarakat Sakai Maju di Perbatinan Tongonong tidak serta merta dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang baru.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pemerintah turut mendorong perkembangan Kelompok Adat Terpencil (KAT) dalam upaya kemandirian melalui kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sejalan dengan ketentuan tersebut, PT Pertamina Hulu Rokan, Wilayah Operasi Duri Steam Flood (DSF) atau yang selanjutnya disebut PHR WO DSF sejak tahun 2021 melaksanakan Program *Indigenous People* bagi Perbatinan Tongonong di Desa Tengganau. Program ini berkembang dengan mengintegrasikan kegiatan ekonomi dan lingkungan, seperti budidaya ternak bebek serta pemanfaatan kotoran hewan menjadi pupuk organik. Inisiatif ini menjadi bentuk intervensi strategis yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat adaptasi masyarakat Sakai pasca-nomaden.

Dalam implementasinya, penelitian ini mencoba melihat proses dan hasil melalui konsep pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Zimmerman (1995, 2000). Konsep ini dikembangkan menjadi tiga dimensi: (1) *Psychological Empowerment*, yaitu bagaimana individu memandang dirinya dalam hubungannya dengan komunitas dan kemampuan mengambil keputusan; (2) *Organizational Empowerment,* yakni bagaimana organisasi lokal membangun kapasitas; (3) *Community Empowerment,* adalah bagaimana komunitas secara kolektif memiliki kontrol terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Secara spesifik, dimensi kontrol komunitas terhadap sumber daya atau *Community Empowerment* ini berfungsi untuk mengenali proses implementasi dari program pemberdayaan.

Selain itu, kerangka *Sustainable Livelihood Framework* (SLF) dari Chambers & Conway (1991) menjadi pisau analisis yang berfokus pada cara masyarakat bertahan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Adapun komponen utama yang digunakan terbagi dalam lima aset penghidupan, yaitu *human capital, social capital, natural capital, physical capital,* dan *financial capital.* Pendekatan ini memudahkan pemetaan sejauh mana program mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan keberlanjutan penghidupan.

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), program ini tidak hanya memenuhi aset penghidupan berkelanjutan, tetapi juga berperan sebagai medium rekonsiliasi sosial. Aktivitas gotong royong dalam pemeliharaan sapi, pengolahan pupuk, dan budidaya bebek menjadi ruang interaksi yang mempertemukan nilai-nilai tradisional suku Sakai dengan praktik ekonomi modern. Lebih jauh, program ini membentuk *life sustainability cycle*, di mana limbah ternak diolah menjadi pupuk organik, digunakan dalam pertanian, dan hasilnya kembali memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.

Kemitraan antara perusahaan dan masyarakat menjadi landasan penelitian ini untuk menelaah dinamika adaptasi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan pola hidup dari berbasis hutan menuju pemukiman menetap. Perubahan tersebut menuntut strategi adaptasi yang tidak hanya berfokus pada penguatan ekonomi lokal, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai budaya. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas intervensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam mendukung proses adaptasi masyarakat adat di tengah tekanan modernisasi dan perubahan lingkungan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

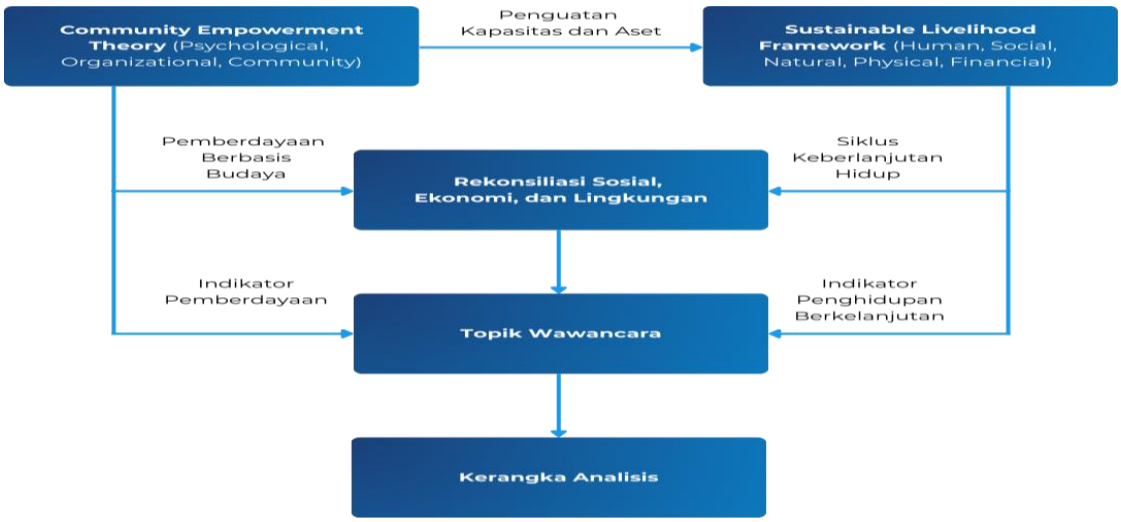
METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk dapat mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa tertentu (Creswell & Creswell, 2017). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keinginan peneliti untuk melihat lebih jauh dan mendalam terkait upaya rekonsiliasi sosial ekonomi dan lingkungan yang dilaksanakan oleh orang Sakai pasca-nomaden. Lebih lanjut, proses tersebut kemudian didukung dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh PHR WO DSF.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan sekunder. Data primer diambil melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk mendalami lebih detail proses dan hasil dari inisiatif pemberdayaan masyarakat tempatan. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mengklasifikasikan jenis data yang ingin digali, di antaranya adalah orang Sakai sebagai penerima manfaat program, baik tokoh lokal maupun anggota kelompok. Terdiri dari dua informan kunci selaku Batin dan ketua kelompok dan tiga informan selaku perempuan anggota kelompok yang mengelola budidaya bebek. Selain itu, data sekunder dilakukan melalui studi pustaka berupa kajian-kajian terkait suku Sakai dan laporan-laporan yang berkaitan dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat tempatan oleh PHR WO DSF.

Sebagai kerangka analisis, penelitian ini memadukan konsep *Community Empowerment* (Zimmerman, 2000) dan (SLF) (Chambers & Conway, 1991) dengan sentuhan konsep rekonsiliasi sosial untuk memahami proses sekaligus hasil program pemberdayaan masyarakat tempatan. Kedua kerangka tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dimensi pemberdayaan, aset penghidupan berkelanjutan, serta pemulihan hubungan sosial-budaya yang relevan dalam konteks adaptasi masyarakat Sakai pasca-nomaden. Aspek dan indikator yang dihasilkan dari sintesis teori ini menjadi dasar perumusan topik wawancara, panduan pengumpulan data, dan acuan dalam proses analisis. Diagram berikut menyajikan keterkaitan antara aspek, indikator, topik wawancara, dan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 1. Relevansi Aspek Teori



Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pendekatan, teknik pengumpulan data, serta kerangka analisis yang telah dijabarkan menjadi landasan untuk mengurai temuan-temuan di lapangan secara sistematis. Melalui perpaduan antara data primer dan sekunder, serta analisis berbasis konsep *Community Empowerment* dan SLF, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai proses adaptasi dan ketahanan masyarakat Sakai pasca-nomaden. Hasil dan pembahasan berikut memaparkan dinamika transformasi tersebut beserta kontribusi program pemberdayaan masyarakat tempatan yang diinisiasi oleh PHR WO DSF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suku Sakai, salah satu suku di Indonesia yang dikenal karena keterasingannya. Namanya banyak muncul di media tentang bagaimana pola hidup yang dianut, seperti semi-nomaden, kepercayaan animisme dan dinamisme, konflik lahan ekologis, hingga represi identitas yang terjadi secara struktural. Dalam berbagai catatan literatur, disebutkan bahwa suku Sakai atau yang biasa disebut orang Sakai tinggal di sepanjang aliran Sungai Siak yang bermuara di Selat Melaka (Isdarwanto & Zulfa, 2016; Hasiholan-Sidauruk et al., 2023; Ningsih & Jalil, 2017). Sebagai upaya bertahan hidup, orang Sakai menanam singkong, menangkap ikan, dan berdagang hasil hutan dengan cara ladang berpindah (Porath, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Porath (2018), disebutkan bahwa pada masa pra-kolonial, orang Sakai menyebut dirinya sebagai orang Batin. Demikian kelompok sosialnya disebut Perbatinan yang dipimpin oleh kepala adat atau Batin. Terdapat hubungan budaya antara suku Sakai dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang kemudian membuka peluang asimilasi dan akulturasi budaya, termasuk terkait kepercayaan. Meski demikian, hukum-hukum adat Sakai masih kental dipertahankan bahkan hingga hari ini. Baru masa Orde Baru yang dimulai pada 1966 hingga 1998 menjadi titik perubahan besar yang menempatkan suku Sakai semakin terasing. Atas nama "pembangunan," pemerintah perlahan melunturkan identitas adat suku Sakai. Hal ini disebabkan oleh retorika pembangunan dari negara terbatas pada upaya membentuk identitas budaya dalam konteks negara modern, membuat hak-hak dan sistem penghidupan yang diyakini oleh masyarakat adat seperti suku Sakai tak dihiraukan (Porath, 2010).

Retorika pembangunan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek ekonomi skala besar yang berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat Sakai. Ekspansi minyak, alih lahan kelapa sawit, dan diikuti proyek infrastruktur negara seperti jalan negara menimbulkan dampak ekonomi dan budaya, isu konflik agraria juga meningkat ditambah dengan degradasi lingkungan akibat deforestasi besar-besaran (Colchester et al., 2023; Porath, 2002). Represi identitas semakin nyata dengan disahkannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang menganut pola penyeragaman model pemerintah desa. Penyeragaman identitas seperti hal tersebut turut serta menyumbang peran kehilangan otonomi bagi perbatinan di suku Sakai (Subašić & Reynolds, 2009).

Orang-orang Sakai tak hanya kehilangan identitas, melainkan juga sumber penghidupan. Banyak angkatan kerja yang kemudian beralih dari pertanian ladang berpindah kepada sektor industri, dengan upah kecil dan ketergantungan yang besar (Hijjang et al., 2023). Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kestabilan ekonomi keluarga, tetapi juga mengikis pengetahuan tradisional dan keterampilan bertani yang telah diwariskan turun-temurun.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Oleh karena itu, posisi masyarakat suku Sakai semakin rentan di tengah arus modernisasi dan persaingan kerja yang ketat. Pasca reformasi, upaya-upaya perjuangan hak afirmatif masyarakat adat mulai diakui. Peran negara, komunitas, dan sektor *private* menjadi penting dalam rangka menciptakan rekonsiliasi sosial, khususnya bagi suku Sakai. CPI pertama kali menggandeng masyarakat suku Sakai di Desa Pematang Pudu dengan membangun kembali makam leluhur suku Sakai, yaitu makam suci Bathin Betuah dan makam suci Sutan Batuah (Hijjang et al., 2023). Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mengembalikan identitas suku Sakai yang sempat terkikis akibat modernisasi dan kebijakan negara, sekaligus membuka ruang dialog antara perusahaan dan komunitas adat untuk membangun hubungan yang lebih setara dan saling menghormati.

Pada 2021, terdapat peralihan perusahaan dari CPI kepada PHR WO DSF. Inisiasi pemberdayaan bagi masyarakat adat suku Sakai pun terus dilanjutkan. Tidak hanya berfokus pada pengembalian identitas yang telah lama pudar, melainkan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi sosial, ekonomi, dan lingkungan di tengah arus modernisasi. Kegiatan ini menjadi satu rangkaian program (TJSL) pemberdayaan masyarakat tempatan pada Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong, Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau.

Pemberdayaan Masyarakat Tempatan: Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong

Pemberdayaan masyarakat adat merupakan strategi pembangunan yang kompleks, terutama dalam konteks relasi historis yang timpang antara entitas industri dan komunitas lokal. Di wilayah operasi PHR WO DSF, khususnya Desa Tengganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, pendekatan ini diwujudkan melalui inisiasi program pemberdayaan masyarakat tempatan yang menyasar komunitas suku Sakai salah satu kelompok masyarakat adat yang secara struktural mengalami marginalisasi akibat ekspansi industri dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong dipilih sebagai sasaran utama karena memiliki basis lokal yang kuat serta potensi ekonomi dalam bidang peternakan yang sebelumnya telah dijalankan secara swadaya oleh masyarakat.

Program ini dimulai pada 2021 sebagai respons terhadap dampak sosial-ekonomi dari pandemi COVID-19, dan terus berlanjut secara bertahap hingga 2024. Melalui kemitraan dengan lembaga akademik seperti LPPM Universitas Lancang Kuning dan Politeknik Negeri Bengkalis, PHR WO DSF merancang intervensi yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga partisipatif. Fase awal mencakup pemetaan kebutuhan komunitas, pembangunan kandang kolektif, pengadaan bibit sapi, serta pelatihan pengolahan limbah ternak menjadi pupuk organik. Fase berikutnya memperluas skema usaha dengan memperkenalkan budidaya bebek petelur sebagai strategi diversifikasi pendapatan rumah tangga.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan akses ekonomi, tetapi juga menguatkan struktur sosial kelompok melalui pembagian peran, rotasi kerja, dan forum musyawarah rutin. Kelompok Tani Fajar Pagi tidak diposisikan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai entitas usaha kolektif yang memiliki kapasitas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, pendekatan Teknologi Tepat Guna (TTG) juga diintegrasikan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan produksi, seperti pemanfaatan mesin pencacah pakan dan pengolahan pupuk berbasis limbah lokal (seperti pelepah sawit). Hal ini selaras dengan pendekatan *appropriate technology* yang dinilai relevan dalam pembangunan masyarakat berbasis lokalitas (Kaplinsky, 2011).

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dari perspektif teoritis, program ini mencerminkan dimensi penting dari teori *Community Empowerment* yang dikembangkan oleh Zimmerman (2000), terutama dalam hal *organizational* dan *community-level empowerment*. Masyarakat tidak hanya mendapatkan akses terhadap sumber daya, tetapi juga diberdayakan untuk mengelola struktur organisasional internal, membangun kepercayaan sosial, dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan. Di sisi lain, pendekatan SLF (Chambers & Conway, 1991) juga dapat digunakan untuk membaca capaian program dalam penguatan lima aset penghidupan utama: sumber daya manusia (peningkatan keterampilan), sosial (solidaritas kelompok), fisik (infrastruktur peternakan), finansial (pendapatan kolektif), dan alamiah (pengelolaan limbah).

Secara praktik, keberhasilan program terlihat dari peningkatan produktivitas dan kemandirian kelompok. Pendapatan kelompok meningkat signifikan dalam dua tahun pertama, jumlah tenaga kerja bertambah, dan aktivitas kelompok mulai menjadi rujukan bagi komunitas sekitar. Perempuan dari keluarga Sakai juga mulai terlibat aktif dalam proses pemeliharaan bebek dan pengumpulan telur, yang menunjukkan adanya transformasi relasi gender dan perluasan spektrum aktor ekonomi lokal (Colchester et al., 2023). Kegiatan ekonomi berbasis kelompok ini juga memperkuat jaringan eksternal kelompok, baik melalui kemitraan dengan penyuluh, akademisi, maupun lembaga desa. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya menghasilkan dampak ekonomi, tetapi juga mengaktivasi *social capital* baru yang memperkuat resiliensi komunitas terhadap tekanan struktural.

Lebih jauh, dari sisi hubungan antara masyarakat adat dan perusahaan, program ini dapat dibaca sebagai instrumen rekonsiliasi sosial yang berupaya menjembatani ketimpangan kuasa melalui kerja sama yang setara dan berbasis dialog. Pendekatan ini relevan dengan konsep *restorative development* yang menekankan pemulihan relasi historis yang rusak akibat industrialisasi dan pengabaian atas hak-hak masyarakat adat (Lederach, 1997; Peluso & Watts, 2001). Peran PHR WO DSF sebagai fasilitator dan bukan dominator menjadi kunci dalam membangun *trust* komunitas dan legitimasi sosial jangka panjang di wilayah operasi.

Penguatan Kapasitas Pada Aset Penghidupan Berkelanjutan

Program pemberdayaan masyarakat tempatan yang dilakukan oleh PHR WO DSF kepada Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong di Desa Tengganau tak semata-mata hanya dilakukan tanpa rencana. Dalam implementasinya, program ini melalui proses-proses mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk mengukur relevansi dan dampak atas kegiatan yang dilaksanakan. Secara teoritis, program pemberdayaan masyarakat bagi Perbatinan Tongonong ini diartikan sebagai proses komunitas menyadari potensi dan sumber dayanya. Oleh karenanya, komunitas tersebut dapat merumuskan serta menjalankan aksi untuk memperbaiki aset penghidupannya.

Konsep *Community Empowerment* dari Zimmerman (2000) memetakan dua komponen penting pada pemberdayaan, yaitu proses dan hasil. Proses pemberdayaan merupakan struktur yang bersifat menguatkan, seperti diskusi, pelatihan, hingga usaha pembangunan infrastruktur penunjang. Sedangkan hasil pemberdayaan merupakan tingkat dari keberdayaan yang dirasakan sebagai tolak ukur keberhasilan proses dalam memberikan kontrol dan akses terhadap sumber daya bagi komunitas.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Selain itu, pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan sebagai bagian dari TJSL PHR WO DSF dirancang dengan landasan SLF. Pendekatan ini dipopulerkan oleh Chambers dan Conway (1991) sebagai pendekatan komprehensif yang menekankan bahwa penghidupan berkelanjutan tak hanya tentang keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga sistem penghidupan yang dapat beradaptasi dan berkembang meski menghadapi tekanan dan perubahan lingkungan. SLF memiliki keunggulan holistik dan integratif yang mana tidak hanya melihat faktor ekonomi, melainkan juga aspek budaya, sosial, politik, hingga lingkungan yang saling mempengaruhi.

Integrasi antara konsep *Community Empowerment* dan SLF menjadi satu landasan kuat untuk keberlangsungan program pemberdayaan masyarakat tempatan Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong oleh PHR WO DSF. Implementasi program didasarkan pada identifikasi ketidakadilan, pengumpulan informasi dan refleksi, pengembangan kapasitas, aksi kolektif dan advokasi, hingga evaluasi dan refleksi ulang. Tabel 1 di bawah menunjukkan proses implementasi dan hasil pemberdayaan masyarakat tempatan oleh PHR WO DSF kepada Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong, salah satu kelompok sosial suku Sakai di Riau.

Tabel 1.1 Indikator Pemberdayaan Masyarakat Tempatan

Aset Penghidupan (SLF)	Indikator	Proses Pemberdayaan	Hasil Pemberdayaan
Human Capital	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu	Diskusi awal program dan pelatihan keterampilan teknis yang diikuti oleh anggota kelompok usaha.	Masyarakat memiliki kemampuan teknis beternak sapi dan bebek, mampu mengolah pakan serta pupuk secara mandiri, dan mulai mempraktikkan teknik beternak yang lebih efisien.
Social Capital	Kekuatan jejaring sosial dan kerja sama komunitas	Kerja sama kelompok dengan luar komunitas seperti dokter hewan, penyuluh peternakan, hingga tengkulak telur bebek.	Terbentuk jaringan pemasaran dan dukungan teknis yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan dan solidaritas antaranggota kelompok dan hubungan dengan pihak luar.
Physical Capital	Pemanfaatan fasilitas bersama untuk mendukung kegiatan	Pengadaan kandang sapi komunal, alat pencacah pakan, infrastruktur pengolahan kotoran hewan, dan kandang bebek.	Tersedianya fasilitas bersama yang mempermudah operasional, mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan kapasitas produksi ternak dan hasil olahan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Aset Penghidupan (SLF)	Indikator	Proses Pemberdayaan	Hasil Pemberdayaan
Natural Capital	Pengelolaan sumber daya alam bersama	Pemanfaatan limbah sawit untuk pakan ruminansia bagi ternak dan pengolahan kotoran hewan untuk pupuk organik.	Pengelolaan limbah pertanian dan peternakan menjadi produk bernilai guna, mengurangi degradasi lingkungan, dan menambah sumber pakan serta pupuk bagi anggota kelompok.
Financial Capital	Akses terhadap pendanaan kolektif dan sistem keuangan kelompok	Diversifikasi pendapatan bagi laki-laki dari ternak sapi dan pengolahan pupuk, serta bagi perempuan dari budidaya telur bebek.	Peningkatan pendapatan rumah tangga, terbentuknya tabungan kolektif kelompok, dan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dari lembaga keuangan lokal.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025

Tabel di atas menunjukkan pemetaan proses dan hasil pemberdayaan yang kemudian dianalisis berdasarkan aset-aset penghidupan dalam konsep SLF. Proses pemberdayaan akan melibatkan kegiatan-kegiatan reflektif kolektif, partisipasi sosial-politik, dan aksi kolektif. Dari proses yang telah dijalankan, maka hasil pemberdayaan dapat diukur melalui adanya peningkatan akses sumber daya, keterlibatan pembuatan keputusan, hingga pengembangan kepemimpinan. Dalam rangka meningkatkan aset sumber daya manusia atau *human capital,* PHR WO DSF mengajak mitra LPPM Universitas Lancang Kuning serta tokoh-tokoh pemangku kepentingan yang ada di suku Sakai. Dihadiri oleh pengurus LAMR Kawasan Batin 8 dan 5, LASR KB 8, LASR KB 5, OKP/LSM Sakai, LPPM UNILAK, dan PHR WO DSF, diskusi terkait rencana jenis usaha dilakukan Kegiatan diskusi awal ini menjadi satu proses pemberdayaan yang mengajak komunitas sasaran pemberdayaan berpartisipasi utuh atas akses sumber daya yang dimilikinya.

Tak hanya itu, pada 2021, PHR WO DSF melalui mitra juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan penunjang usaha, di antaranya adalah pelatihan pembuatan pakan ruminansia, pelatihan teknologi tepat guna mesin pencacah pakan ternak, dan pelatihan pengolahan urin sapi menjadi pupuk organik. Upaya peningkatan kapasitas terus dilanjutkan hingga pada 2024 terdapat perluasan usaha bagi perempuan berupa budidaya telur bebek. Kegiatan pelatihan-pelatihan ini menjadi upaya TJSL PHR WO DSF dalam meningkatkan kualitas *human capital* bagi masyarakat Sakai, khususnya Perbatinan Tongonong.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Gambar 2. Peningkatan Kapasitas Keterampilan Kelompok



Sumber: Dokumentasi Perusahaan, 2023

Modal sosial atau *social capital* menjadi instrumen yang tak kalah penting dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, individu membutuhkan jejaring sosial untuk keberlangsungan hidupnya (Holt-Lunstans et. al., 2010). PHR WO DSF menggandeng berbagai mitra. Pada tahun 2021–2022, LPPM UNILAK menjadi mitra yang turun langsung dalam implementasi pemberdayaan. Kerja sama mitra dilanjutkan oleh Politeknik Negeri Bengkalis pada 2023–2024. Selain untuk memperluas jejaring sosial, kerja sama ini dibentuk sebagai salah satu strategi untuk menghadirkan *expertise* yang tidak dimiliki PHR WO DSF sebagai perusahaan migas. Mitra akademik memiliki kapasitas teknis, metodologi riset, dan kedekatan dengan konteks sosial-budaya masyarakat tempatan yang memungkinkan program berjalan lebih tepat sasaran dan jangka panjang. Dengan kata lain, mitra bukan sekadar pelaksana, tetapi juga penguat pengetahuan dan inovasi yang mengisi celah keahlian di luar bidang inti PHR WO DSF.

Sirkulasi ekonomi dari usaha penggemukan sapi dan budidaya telur bebek yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong juga melibatkan banyak aktor dengan peran-peran penting. Sebagaimana dalam kegiatan penggemukan sapi, anggota kelompok melibatkan peternak lain untuk mendapatkan bibit dan juga ilmu secara informal dalam ternak sapi. Tak jarang juga terbentuk hubungan sosial antara peternak dengan penyuluh peternakan maupun tenaga kesehatan hewani demi keberlangsungan ternak.

Pengembangan usaha seperti budidaya telur bebek dan juga pengolahan kotoran hewan (KOHE) menjadi pupuk organik turut serta mengembangan jaringan sosial bagi kelompok terkait. Tak hanya mitra penunjang produksi, kelompok juga menciptakan hubungan sosial dengan pihak lain untuk memasarkan produknya. Salah satunya adalah para petani yang membutuhkan pupuk. Alih-alih berkontribusi atas degradasi lingkungan dengan pupuk kimia, pupuk organik yang diproduksi oleh Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong menjadi pilihan yang ramah lingkungan. Telur-telur bebek yang dipanen setiap harinya oleh para ibu Perbatinan Tongonong juga dibeli oleh pengepul telur yang siap mendistribusikan kepada unit usaha lain seperti warung dan penjual minuman bandrek. Kemitraan semakin meluas seiring berkembangnya usaha menjadi penanda bahwa aset *social capital* yang dimiliki semakin kuat beriringan dengan implementasi program pemberdayaan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

PHR WO DSF memberikan alat infrastruktur penunjang program pemberdayaan. Pengadaan infrastruktur ini menjadi bagian dari pengembangan aset *physical capital* berupa kandang sapi, kandang bebek, sarana prasarana pembuatan pupuk, hingga mesin pencacah untuk pakan ternak. Kehadiran infrastruktur tersebut memudahkan proses produksi, mengurangi beban biaya operasional kelompok, serta meningkatkan kapasitas usaha secara kolektif. Selain berfungsi sebagai fasilitas fisik, keberadaan aset ini juga menjadi pemicu terbentuknya sistem kerja sama yang lebih terstruktur di antara anggota kelompok, mendorong pemeliharaan bersama, dan membuka peluang diversifikasi produk yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara konsisten.

Gambar 3. Infrastruktur Penunjang Program (Kandang Bebek)



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain aspek sosial dan infrastruktur, satu hal yang penting dalam program pemberdayaan ini adalah aspek alam. Pembangunan kandang sapi dan bebek sebagai infrastruktur produktif menjadi alat penunjang pemberdayaan kelompok marginal dengan mengonversi aset alam menjadi pendapatan berkelanjutan (Ellis & Freeman, 2004). Sebelum menjadi barang bernilai lebih tinggi dengan proses produksi melalui aset infrastruktur, masyarakat Perbatinan Tongonong memiliki modal alam yang melimpah. Bantuan modal berupa bibit sapi dan bebek merupakan modal stimulan usaha ternak, serta terdapat limbah daun sawit yang kemudian berhasil dimanfaatkan sebagai bahan pakan ruminansia. Tak hanya pakan yang memanfaatkan limbah kotoran dari ternak (khususnya sapi), limbah juga dimanfaatkan oleh kelompok menjadi pupuk organik baik cair maupun padat. Selain meningkatkan efisiensi produksi, program pemberdayaan oleh PHR WO DSF ini juga menjadikan masyarakat Perbatinan Tongonong sebagai pioner perbaikan kualitas lingkungan melalui pemanfaatan limbah sawit dan kotoran hewan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Dari semua aset yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat tempatan, *outcomes* yang paling tampak adalah *financial capital.* Masyarakat Perbatinan Tongonong sama halnya seperti masyarakat kelompok lain di suku Sakai yang dulunya hidup semi-nomaden dengan mengandalkan hasil alam. Transformasi kehidupan membuatnya mau tidak mau mengikuti arah sistem ekonomi berlabuh. Dari hutan dengan kekayaan yang melimpah, banyak orang Sakai yang bergantung pada sektor industri dengan upah kecil dan ketergantungan yang tinggi. Oleh karenanya, penggemukan sapi dan pengolahan KOHE menjadi diversifikasi usaha untuk meningkatkan nilai ekonominya. Tak hanya laki-laki, perempuan juga turut serta menjadi jaring pengaman ekonomi keluarga melalui budidaya telur bebek.

Gambar 4. Telur Bebek Hasil Panen Harian



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Upaya Rekonsiliasi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Perlu diingat bahwa suku Sakai di Riau menghadapi tekanan ganda, yakni dimensi kultural dan struktural. Sebagai masyarakat adat, suku Sakai merupakan minoritas. Tak hanya itu, orang Sakai pada akhirnya merupakan korban marginalisasi akibat ekspansi industri. Tekanan ini muncul sebagai akibat dari adanya relasi kuasa yang timpang antara adat, negara, dan korporasi itu sendiri. Perampasan hutan oleh perusahaan, khususnya untuk alih lahan sawit adalah bentuk kekerasan struktural berbasis kuasa (Peluso & Watts, 2001). Orang-orang Perbatinan Tongonong dan Perbatinan lain suku Sakai tak lebih dari subjek yang terus dipinggirkan dalam proses pembangunan; suaranya kerap diabaikan, ruang hidupnya dipersempit, dan kedaulatan adatnya dilemahkan. Dalam lanskap ini, kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungannya semakin bergantung pada mekanisme yang dikendalikan pihak luar, membuat posisi tawar orang Sakai nyaris hilang di hadapan negara maupun pasar.

Rekonsiliasi menjadi upaya yang digaungkan sebagai konsep memulihkan hubungan dengan membangun relasi yang saling memberdayakan, bukan hanya menyelesaikan perselisihan (Lederach, 1997). PHR WO DSF tak hanya melakukan pemberdayaan sebagai peredam gesekan konflik antara masyarakat adat dengan proses industri yang berupa sekadar ganti rugi materi, melainkan restorasi hubungan adat-korporasi untuk menjalin relasi yang tidak

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

timpang dan berdaya. Ada komunikasi dua arah yang terjadi, ada kuasa yang diberikan pada orang Sakai sebagai korban marginalisasi modernitas.

Dalam implementasinya, PHR WO DSF berupaya menempatkan identitas sosial suku Sakai sebagai pijakan utama. Praktik musyawarah yang melibatkan lembaga adat dari Perbatinan 8 dan 5 menjadi mekanisme deliberatif yang mengakomodasi suara masyarakat sekaligus menjaga legitimasi adat (Braithwaite, 2002). Pendekatan partisipatif ini berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi antara komunitas adat dan pihak eksternal, serta membuka jalan bagi proses adaptasi masyarakat Sakai di tengah modernisasi tanpa harus mengorbankan akar budayanya. Dengan demikian, forum musyawarah tidak sekadar prosedur formal, melainkan instrumen penting untuk menghidupkan kembali kedaulatan sosial yang sempat terpinggirkan.

Program *Indigenous People* yang dikembangkan oleh Kelompok Tani Fajar Pagi mencerminkan integrasi konkret antara nilai-nilai budaya lokal dan praktik ekonomi modern. Dalam pelaksanaannya, aktivitas seperti pembagian peran, perawatan ternak, hingga pengelolaan hasil produksi dijalankan secara kolektif melalui mekanisme musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berseberangan dengan tradisi; sebaliknya, ketika dikelola secara kontekstual dan berbasis dialog, ia dapat menciptakan ruang belajar bersama yang memperkuat adaptasi sosial (Berkes, Colding, & Folke, 2000). Model ini menghadirkan pola ekonomi produktif yang tetap menghormati kearifan komunitas, dengan partisipasi aktif dari seluruh anggota kelompok dalam menentukan strategi usaha, termasuk pemasaran hasil produksi. Kehadiran sistem ini menjadi bukti bahwa transformasi ekonomi dapat berlangsung tanpa menyingkirkan identitas kolektif, melainkan memperkuatnya dalam bentuk baru yang lebih adaptif.

Dampak ekonominya terlihat jelas melalui peningkatan ketahanan pangan dan daya beli rumah tangga. Pendapatan dari penjualan telur bebek dan ternak sapi digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti sembako, biaya pendidikan, dan perbaikan tempat tinggal. Lebih jauh, perempuan Sakai memainkan peran signifikan dalam budidaya bebek, yang tidak hanya menopang ekonomi keluarga tetapi juga memperluas partisipasi perempuan dalam ruang ekonomi komunitas (Colchester, Anderson, & Dinata, 2023). Hal ini mencerminkan perluasan daya adaptif yang lebih inklusif secara gender. Dengan demikian, program pemberdayaan berbasis peternakan ini tidak sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga medium transformatif yang mempertemukan nilai kolektif seperti gotong royong dan musyawarah dengan inovasi ekonomi produktif, yang mampu memperkuat resiliensi komunitas adat dalam menghadapi dinamika modernitas (Altieri, 2009).

Anggota Kelompok Tani Fajar Pagi Perbatinan Tongonong bukan hanya menjadi pelaku usaha untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi di tengah modernitas, melainkan juga menjadi pionir lingkungan yang berorientasi pada masa depan. Melalui usaha ternak penggemukan sapi, aktivitas dikembangkan menjadi pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik. Upaya ini tidak semata menjawab kebutuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan degradasi lahan yang sebelumnya terdampak oleh alih fungsi hutan ekologis menjadi perkebunan sawit yang sarat penggunaan pupuk kimia (Altieri, 2009; Colchester et al., 2023). Meskipun masih berada pada skala kecil, praktik ini menjadi embrio kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *agro ecological resilience* yang menekankan pengelolaan limbah berbasis komunitas sebagai strategi adaptif terhadap krisis ekologi dan ketimpangan struktural (Berkes, Colding, & Folke, 2000; Chambers & Conway, 1991). Inisiatif ini juga mengandung pesan penting bahwa rekonsiliasi dengan alam dapat dilakukan melalui langkah sederhana, namun berdampak jangka panjang terhadap kualitas tanah, keberlanjutan ekosistem, dan kemandirian masyarakat adat dalam mengelola ruang hidupnya (Peluso & Watts, 2001; Ellis & Freeman, 2004).

Dengan melihat integrasi antara nilai budaya, inovasi ekonomi, dan kesadaran ekologis yang tumbuh dari dalam komunitas, dapat disimpulkan bahwa upaya rekonsiliasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dilakukan melalui program pemberdayaan ini bukan sekadar bentuk intervensi teknis, melainkan proses transformatif yang memperkuat posisi masyarakat adat dalam menghadapi tantangan modernitas. Inisiatif ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi sejati tidak hanya menuntut pengakuan atas luka historis dan ketimpangan struktural, tetapi juga membutuhkan ruang partisipatif masyarakat dapat membangun kembali sistem penghidupan yang berdampak jangka panjang baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis berdasarkan jati diri dan pengetahuan lokal mereka sendiri.

Sintesis Temuan dan Diskusi Kritis

Secara keseluruhan, Program *Indigenous People* yang dijalankan oleh PHR WO DSF telah menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap transformasi kehidupan komunitas Suku Sakai. Dampak tersebut tercermin dalam meningkatnya kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola kegiatan ekonomi secara mandiri, terbentuknya jaringan kerja internal dan eksternal yang memperkuat *social capital*, serta tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Transformasi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat adat tidak hanya memungkinkan, tetapi juga berpotensi menciptakan rekonsiliasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berakar dari kekuatan komunitas itu sendiri. Namun demikian, temuan lapangan juga memperlihatkan sejumlah tantangan struktural dan kultural yang perlu dibaca secara kritis dalam kerangka teoritis. Untuk itu, pendekatan *Community Empowerment* seperti dikembangkan oleh Zimmerman (2000), dan SLF oleh Chambers dan Conway (1991), menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana kekuatan internal komunitas mampu dimobilisasi dalam menghadapi ketimpangan kekuasaan, keterbatasan aset penghidupan, serta dinamika nilai di dalam komunitas itu sendiri.

Pertama, tantangan ketimpangan kekuasaan masih menjadi isu sentral dalam proses pemberdayaan. Dalam dimensi *Community Empowerment*, khususnya pada aspek *organizational* dan *community-level empowerment*, distribusi kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan menjadi elemen utama. Namun pada kenyataannya, struktur relasi antara masyarakat Sakai dan aktor eksternal seperti pemerintah dan korporasi masih menunjukkan relasi kuasa yang timpang. Komunitas sering kali hanya menjadi pelaksana dari agenda yang telah dirancang dari luar, bukan sebagai subjek aktif yang memiliki otonomi atas arah perubahan sosialnya. Hal ini sejalan dengan argumen Subašić dan Reynolds (2009) tentang bagaimana ketimpangan struktural menghambat pemberdayaan yang sejati, serta pentingnya memperjuangkan keadilan relasional dalam upaya rekonsiliasi.

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kedua, dalam kerangka SLF, program ini menghadapi tantangan keterbatasan akses terhadap aset penghidupan, terutama *human capital* dan *financial capital*. Meskipun pelatihan teknis telah diberikan, belum semua anggota kelompok, terutama perempuan dan warga lansia, memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola usaha secara mandiri. Proses transfer pengetahuan berjalan lambat karena masih bergantung pada peran mitra eksternal. Dalam pandangan Chambers dan Conway (1991), penghidupan berkelanjutan hanya dapat dicapai ketika masyarakat memiliki aset dasar yang cukup dan mampu mengelola risiko secara mandiri. Dalam konteks ini, suku Sakai masih berada pada tahap awal dari perjalanan menuju resiliensi jangka panjang.

Ketiga, jika dilihat dari aspek *psychological empowerment*, terdapat tantangan dalam membangun kesadaran kolektif dan kohesi nilai dalam komunitas. Perbedaan pengalaman hidup dan latar belakang antara anggota kelompok, misalnya antara generasi muda dan tua, atau antara mereka yang pernah bekerja di industri dan yang tetap hidup di sekitar hutan menimbulkan perbedaan persepsi terhadap kerja, waktu, dan tanggung jawab kolektif. Perbedaan ini dapat menghambat pembentukan visi bersama dan komitmen jangka panjang terhadap program. Berkes, Colding, dan Folke (2000) menekankan bahwa keberhasilan integrasi pengetahuan tradisional dengan inovasi modern sangat tergantung pada kemampuan komunitas untuk membangun kesepakatan nilai yang adaptif dan inklusif.

Dalam konteks ini, tantangan-tantangan yang muncul tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Pemberdayaan masyarakat adat bukan sekadar soal menyediakan akses terhadap pelatihan atau modal usaha, tetapi juga soal membuka ruang negosiasi kuasa, memperkuat kepercayaan diri komunitas, dan membangun solidaritas internal yang berbasis pada nilai dan identitas lokal. Jika tidak disikapi dengan pendekatan yang transformatif, pemberdayaan dapat terjebak menjadi sekadar kegiatan instrumental tanpa memperkuat struktur sosial dan kapasitas kritis komunitas. Oleh karena itu, keberhasilan program TJSL dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan untuk menjembatani kesenjangan antara struktur kekuasaan, akses terhadap aset penghidupan, dan kohesi sosial-budaya di tingkat komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi kehidupan suku Sakai pasca-nomaden tidak dapat dilepaskan dari dinamika modernisasi, deforestasi, dan marginalisasi struktural yang dialami, tak terkecuali pada unit analisis Perbatinan Tongonong. PHR WO DSF kemudian menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat tempatan sebagai salah satu intervensi strategis guna mendukung proses adaptasi transformasi kehidupan yang dialami. Kegiatan tersebut diturunkan dalam bentuk usaha penggemukan sapi, budidaya telur bebek, hingga pengolahan pupuk organik berbasis kelompok. Dari upaya intervensi ini, masyarakat Sakai mampu mengembangkan penghidupan baru yang tak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

Melalui pendekatan *Community Empowerment* (Zimmerman, 2000) dan SLF (Chambers & Conway, 1991), studi ini menunjukkan bahwa program berhasil memperkuat lima aset penghidupan utama. Kelima aset tersebut mencakup *human capital* (peningkatan keterampilan dan kapasitas teknis melalui pelatihan dan pendampingan), *social capital* (penguatan jejaring kerja dan solidaritas kelompok), *physical capital* (penyediaan infrastruktur produktif dan sarana

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603
Jurnal Pengabdian Masyarakat

TTG), *natural capital* (pemanfaatan limbah ternak dan pertanian untuk produksi pupuk organik), dan *financial capital* (diversifikasi pendapatan melalui ternak sapi dan budidaya bebek). Kelima aset ini membentuk fondasi bagi siklus keberlanjutan hidup (*life sustainability cycle*) yang memperkuat ketahanan komunitas Sakai dalam jangka menengah hingga panjang.

Integrasi nilai budaya dengan praktik ekonomi modern telah melahirkan skema kehidupan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga mampu menjaga identitas sosial komunitas. Kegiatan ekonomi berbasis kelompok, musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta pembagian peran yang setara memperlihatkan bahwa modernisasi dapat bersanding dengan nilai-nilai budaya lokal, bukan menggantikannya. Di sisi lain, praktik berkelanjutan seperti pemanfaatan limbah organik dan pakan lokal menegaskan bahwa masyarakat adat juga dapat menjadi aktor utama dalam agenda pembangunan jangka panjang.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjamin keberlanjutan program jangka panjang, menjaga konsistensi partisipasi komunitas, serta mendorong keterlibatan aktor di luar perusahaan. Beberapa kelompok rentan, seperti lansia dan sebagian perempuan, masih menghadapi hambatan dalam keterlibatan aktif. Oleh karena itu, keberhasilan pemberdayaan masyarakat adat membutuhkan kemitraan multipihak antara perusahaan, pemerintah, akademisi, dan komunitas adat untuk memastikan transformasi ini terus berlanjut secara inklusif dan berkeadilan.

Secara teoritis, pengalaman Suku Sakai di Tengganau menegaskan relevansi pendekatan *Community Empowerment* (Zimmerman, 2000) dan SLF (Chambers & Conway, 1991) dalam memahami transformasi masyarakat adat. Kedua pendekatan ini menjelaskan bagaimana penguatan aset penghidupan dapat mendorong adaptasi yang berkesinambungan. Keterlibatan aktif komunitas menjadi elemen kunci dalam mendorong perubahan dari dalam. Selain itu, proses pemberdayaan ini mencerminkan prinsip *cultural resilience* (Berkes & Ross, 2013), yakni kapasitas komunitas untuk mempertahankan identitas dan nilai budaya di tengah tekanan eksternal yang hegemonik.

Lebih lanjut, narasi transformasi dalam penelitian ini sejalan dengan konsep *restorative development* (Lederach, 1997), yang memandang pembangunan bukan semata sebagai proses ekonomi. Pembangunan juga diposisikan sebagai upaya memulihkan relasi kuasa yang timpang antara komunitas adat dan aktor eksternal, seperti negara dan korporasi. Dalam konteks ini, rekonsiliasi sosial, ekonomi, dan lingkungan tidak muncul dari intervensi teknokratik semata. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari proses negosiasi kultural, adaptasi struktural, dan penguatan kapasitas kolektif yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Altieri, M. A. (2009). Agroecology, small farms, and food sovereignty. *Monthly Review, 61*(3), 102–113.

Andaya, B. W. (1997). Recreating a vision: Daratan and Kepulauan in historical context. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 153*(4), 483-508. https://doi.org/10.1163/22134379-90003911

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Asriwandari, H., Jalil, A., Hidir, A., Bahri, S., Yesi, & Sugiyanto, S. (2024). The Land and The Sources of Livelihood for the Sakai Tribe in Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. *Indonesian Journal of Social and Environmental Issues (IJSEI)*, *5*(3), 347–354. https://doi.org/10.47540/ijsei.v5i3.1608

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications, 10*(5), 1251–1262. https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2

Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community Resilience: Toward an Integrated Approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5–20. https://doi.org/10.1080/08941920.2012.736605

Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

Chambers, R., & Conway, G. R. (1991). *Sustainable rural livelihoods: Practical concepts for the 21st century* (IDS Discussion Paper 296). Institute of Development Studies.

Colchester, M., Anderson, P., Oktavian, H., & Dinata, H. (2023). *The Sakai, Asia Pulp and Paper and the Indigenous Peoples of Sumatra: Towards remedy?* Forest Peoples Programme.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ

Ellis, F., & Freeman, H. A. (2004). Rural livelihoods and poverty reduction strategies in four African countries. *Journal of Development Studies, 40*(4), 1–30. https://doi.org/10.1080/00220380410001673175

Hasiholan-Sidauruk, R. S., Zulfi, M., & Astuti, D. (2023). *Masyarakat Sakai: Menelusuri jejak identitas suku Melayu kuno yang terlupakan dari Provinsi Riau*. Jurnal Jejak Ekonomi, 2(2), 45–58. https://journal.jotika.co.id/index.php/JJE/article/view/149

Hijjang, P., El Amady, M. R., & Hadi, A. (2023). The new Sakai: Efforts to construct the Sakai identity. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia, 8*(1), 63–75. https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.24451

Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: A meta-analytic review. *PLoS Medicine, 7*(7), e1000316. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316

Isdarwanto, T., & Zulfa, Z. (2016). *Suku Sakai dalam tiga kekuasaan di Riau*. Jurnal Ilmu Budaya, 12(2), 111–120. https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/719

Kaplinsky, R. (2011). *Innovation and pro-poor growth*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264094611-en

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

E ISSN : 2986-5603

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.

Muttaqien, W., & Bosniar. (2013). *Sakai Maju*. [Laporan penilaian cepat/rapid assessment]. Akademi Sinau & Desa Kuala Penaso, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Ningsih, D., & Jalil, A. (2017). *Perubahan sosial budaya Suku Sakai Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak*. JOM FISIP, 4(2), 1–12. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15881

Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). *Violent environments*. Cornell University Press.

Porath, N. (2002). A river, a road, an indigenous people and an entangled landscape in Riau, Indonesia. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 158*(4), 769–797. https://doi.org/10.1163/22134379-90003728

Porath, N. (2010). "They have not progressed enough": Development's negated identities among two indigenous peoples (orang asli) in Indonesia and Thailand. *Journal of Southeast Asian Studies, 41*(2), 267–289. https://doi.org/10.1017/S0022463410000056

Porath, N. (2018). The Orang Batin/Orang Sakai in the Malay Kingdom of Siak Sri Indrapura. *Asian Ethnology, 77*(2), 285–306. https://doi.org/10.2307/26604842

Subašić, E., & Reynolds, K. J. (2009). Beyond "practical" reconciliation: Intergroup inequality and the meaning of non-Indigenous identity. *Political Psychology, 30*(2), 243–267. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2008.00688.x

Warren, J. F. (2003). A tale of two centuries: The globalisation of maritime raiding and piracy in Southeast Asia at the end of the eighteenth and twentieth centuries. *Murdoch University Working Paper*. https://researchportal.murdoch.edu.au/esploro/outputs/workingPaper/991005541093907891

Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American Journal of Community Psychology, 23*(5), 581–599. https://doi.org/10.1007/BF02506983

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4193-6_2

Copyright to the author of some rights reserved This work is licensed under aCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.